

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, yaitu dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor mempunyai Fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

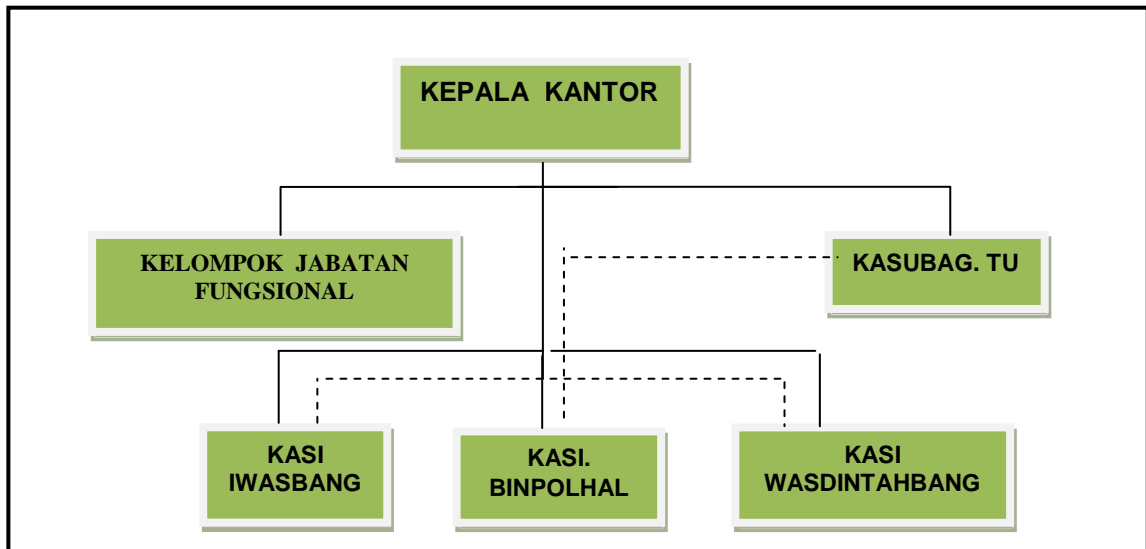
Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing unsur susunan organisasi akan dijabarkan di bawah ini.

- a. Kepala Kantor;
- b. Su Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Kepala Seksi Bina Politik Dan Politik Dan Hubungan Antar Lembaga;
- e. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Dan Ketahanan Bangsa;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

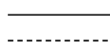
Secara lengkap Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor



Keterangan :



: Garis Instruktif
: Garis Koordinatif

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Kepala Kantor, Sekretariat dan Seksi adalah sebagai berikut :

1. KEPALA KANTOR

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam Memimpin dan Mengkoordinasikan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan kantor.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan penyusunan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja kantor;
- b. Pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengendalian, dan pertanggung jawaban administrasi Kepegawaian Kantor;
- d. Pengelolaan situs web Kantor; dan
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Kantor.
- f. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi

3. SEKSI BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Kesatuan Bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan pembinaan dan fasilitasi Ketahanan Idiologi Bangsa;
- b. Pengelolaan fasilitasi, dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan penghargaan Kebangsaan; dan
- c. Pengelolaan pembinaan dan fasilitasi bela Negara.

4. SEKSI BINA POLITIK DAN POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan di bidang system dan implementasi Politik, serta hubungan antar lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pengembangan sistem dan implementasi politik;
- b. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pengembangan Budaya dan pendidikan Politik; dan
- e. Fasilitasi Pemilihan umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Kepala daerah.

5. SEKSI KEWASPADAAN DINI DAN KETAHANAN BANGSA

Seksi Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan Pengelolaan Pembinaan dan Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kerjasama Intelejen Keamanan;
- c. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;

- d. Pembinaan Ketahanan Seni dan Budaya;
- e. Pembinaan Ketahanan Agama dan Kepercayaan;
- f. Penanganan Masalah Sosial dan Konflik Sosial; dan
- g. Pembinaan Pembauran dan Akulturasi Budaya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, dipimpin oleh seorang coordinator yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Lembaga Teknis Daerah. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2.2. SUMBER DAYA PADA KANTOR KESBANGPOL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor sebanyak 36 orang yang terdiri dari PNS , tenaga kontrak dan tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 2.2.1

Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2017

No	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS	27	76
2.	PETUGAS KEAMANAN	5	14
3.	PETUGAS KEBERSIHAN	4	10

	JUMLAH	36	100
--	--------	----	-----

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kantor Kesbangpol masih ada yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Outsourcing Keamanan dan Kebersihan. Sehingga penulisan tentang kondisi Pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 27 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembentukan Lemtekda Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kantor Kesbangpol terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 5 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Menduduki
Jabatan Dan Staf Tahun 2017

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III	1	4
2.	Eselon IV	4	15
3.	Staf	22	81
	Jumlah	27	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 27 jumlah Pegawai yang ada di Kantor Kesbangpol terdapat 68% pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 6%. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan II yaitu 26 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.2.3.
Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Berdasarkan
Pangkat/Golongan Tahun 2017

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	3	6
2.	III	17	65
3.	II	7	29
	Jumlah	27	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Kesbangpol yang ada, maka status Pendidikan Strata-2 sebesar 10% Strata-1 sebesar 29% dan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu masing-masing sebesar 52 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 3 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.4

Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	3	11
2.	Strata-1 (S1)	9	32
3.	Sarjana Muda/ D3	2	7
4	SLTA/SMK	12	46
5	SLTP	1	4
	Jumlah	27	100

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 10 % Pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 3 jenis

disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 29 % yang terdiri dari 8 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.2.5
Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Berdasarka
Kesarjanaan Tahun 2017

No.	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang)
A	MAGISTER	
	1. Manageman Ilmu Pemerintahan	1
	2. Manageman Pembangunan Sosial	1
	2. Manageman Sumber Daya Manusia	1
B	SARJANA	
	1. Ilmu Pemerintahan	2
	2. Adm. Negara	2
	3. Ilmu Administrasi	2
	4. Ilmu Hukum	2
	5. Ilmu Komputer	1
	6. Ekonomi	3
	7. Managemen Pembangunan Daerah	1
C	SARJANA MUDA	
	1. Ilmu Pemerintahan	1
D	KEJURUAN	3
E	UMUM	8
	Jumlah	28

Tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kantor Kesbangpol menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

masyarakat di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kantor Kesbangpol pada Tahun 2017, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 31 pegawai Kantor Kesbangpol terdapat 12.33 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 6.66 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel 2.6

Tabel 2.2.6

Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Yang Mengikuti Penjenjangan Tahun 2017

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Spama/Diklat PIM III	4	12.33
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	2	6.66
	Jumlah	6	20.00

2.3. KONDISI UMUM ANGGARAN

Pagu Anggaran pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan, semula pada tahun 2011 sebesar 4.451.120.000,- , 2012 sebesar Rp. 5.340.592.000,-, 2013 sebesar Rp. 6.550.952.000,- dan pada tahun 2017, menjadi Rp

7.315.450.000,- Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2011 sebesar 3.921.011.054,-, 2012 sebesar 5.054.909.145,-, 2013 sebesar Rp. 6.276.878.261,-, 2014 sebesar Rp. 7.315.450.000,-, 2015 sebesar Rp. 7.953.073.00,- dan Tahun 2017 sebesar Rp. 7.815.703.000 yang setiap tahun mengalami peningkatan, Anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2011-2017, sebagai berikut :

TABEL 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2011-2016

TAHUN	ANGGARAN (RP .)	REALISASI	%
2011	4.451.120.000	3.921.011.054	88.09
2012	5.340.592.000	5.054.909.145	94.65
2013	6.550.952.000	6.276.878.261	95.81
2014	7.315.450.000	6.227.631.889	85,13
2015	7.953.073.000	7.003.958.629,-	88,06
2016	7.496.791.000	7.065.278.729	94,24
2017	7.815.703.000		

2.4. KONDISI UMUM SARANA KERJA

Sarana kerja yang ada di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini:

Tabel. 2.2.8
Sarana Kerja Kantor Kesbangpol s.d Tahun 2017

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	1.835	M2
2	GEDUNG	1	UNIT

		533	(1 LANTAI) M2
3	LISTRIK	1	JARINGAN
4	AIR	1	JARINGAN
5	TELPON	2	LINE 2 (1 FAX)
6	AREA PARKIR	1	AREA
7	RUANG RAPAT	1	RUANG
8	RUANG ARSIP	1	RUANG
9	MUSOLLA	1	BUAH
10	KENDARAAN RODA 4	3	UNIT
11	KENDARAAN RODA 2	8	UNIT
12	MEJA RAPAT	1	SET
13	AC	7	UNIT
14	KOMPUTER PC	7	UNIT
15	KOMPUTER NOTEBOOK	3	UNIT
16	MEJA KERJA	46	UNIT
17	KURSI KERJA	79	UNIT
18	FILLING KABINET	6	UNIT
19	RAK ARSIP	5	UNIT
NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
20	INFOKUS	2	UNIT
21	JARINGAN INTERNET	1	JARINGAN
22	AREA TAMAN LUAR	1	AREA
23	KURSI RAPAT	100	UNIT

2.5. KINERJA PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL

Indikator Kinerja pelayanan Kantor Kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, Pencapaian kinerja ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Kantor Kesbangpol. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD

2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KANTOR KESBANGPOL

Berdasarkan kondisi umum di atas yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, guna Pengembangan Pelayanan SKPD diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (S):

- a) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b) Situasi kerja yang harmonis (tim work);
- c) Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas dan Yayasan).

KELEMAHAN (W):

- a) Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja ;
- b) Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
- c) Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.

2. LINGKUNGAN EKTERNAL

PELUANG (O):

- a) Wilayah kabupaten bogor yang sangat luas;
- b) Jumlah penduduk kabupaten Bogor yang sangat besar;
- c) Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan;
- d) Berkembangnya LSM, Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya (Orkemas) yang ada di kabupaten bogor;
- e) Teknologi informasi yang semakin canggih .

ANCAMAN (T):

- a) Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
- b) Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
- c) Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;

- d) Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas dan yayasan) dapat mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan;
- e) Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
- f) Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.

<p style="text-align: center;">ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)</p> <p>ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)</p>	<p style="text-align: center;">Peluang / Opportunities</p> <p>a) Luas wilayah kabupaten bogor yang sangat luas;</p> <p>b) Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat besar;</p> <p>c) Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai Pusat Pemerintahan;</p> <p>d) Teknologi informasi yang semakin canggih</p>	<p style="text-align: center;">Ancaman / Threats</p> <p>a) Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif; masyarakat yang tidak merata; instabilitas di masyarakat;</p> <p>d) Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas dan Yayasan) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan;</p> <p>e) Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;</p> <p>f) Rentanya konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke adamaan.</p>
<p style="text-align: center;">Kekuatan / Strengths</p> <p>a) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;</p> <p>b) Situasi Kerja yang harmonis (tim work)</p> <p>c) Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas dan Yayasan)</p>	<p style="text-align: center;">S – O</p> <p>1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tupoksi bisa tercapai</p> <p>2. Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan</p> <p>3. Pemfasilitasan yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik</p>	<p style="text-align: center;">S – T</p> <p>1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainnya Agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman Instabilitas;</p> <p>2. Mengktakan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;</p> <p>3. Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat;</p> <p>4. Meningkatkan Pembinaan/Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai luhur Budaya Bangsa serta Toleransi antar Umat Beragama.</p>
<p style="text-align: center;">Kelemahan / Weakness</p> <p>a) Kwantitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja ;</p> <p>b) Kuantita SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;</p> <p>c) Kelebagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi</p>	<p style="text-align: center;">W – O</p> <p>1. Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan antar lembaga diharapkan peranan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainnya , agar terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Bogor.</p> <p>2. Pengoptimalisasian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>3. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa;</p> <p>4. Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.</p>	<p style="text-align: center;">W – T</p> <p>Untuk Meminimalisir efek negative dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di Lakukan Upaya Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal & eksternal Agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada.</p>

